

Kepercayaan Diri Atlet PON DIY Menghadapi PON XVI di Palembang <i>Oleh: Dimiyati</i> .....	61-74
Atribusi Kekerasan pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga <i>Oleh: Siti Rohmah Nurhayati</i> .....	75-88
Kemiskinan dan Beban Kerja Perempuan di Lereng Merapi Selatan <i>Oleh: Hastuti</i> .....	89-108
Biodata Penulis .....	109-110

**PERLAWANAN NAHDLATUL ULAMA (NU)  
TERHADAP PEMERINTAH ORDE BARU  
MELALUI WACANA POLITIK**

**Oleh:**  
**Arif Rohman**  
Staf Pengajar FIP UNY

**Abstract**

*The study intends to describe the process of Nahdlatul Ulama (NU) critical faction resistance against hegemony by New Order nation through political discourse. Some data can be collected through in-depth interview and through document study. The interview was done toward six people elite of NU, while the document study originated from the clipping from Jawa Pos scripts, and three NU magazines: Asla, Pesantren, and Bangkit. Eventually, some data especially based on the further interview result is processed by qualitative analysis and it be collected through document study is processed by content analysis. The final inference obtained is, that during the period of one decade before upcoming president Soeharto falling, have become the conflict relation between NU critical faction against New Order nation through the political discourse. So, the correlation between both is in more antagonistic strip. The portrait of political conflict in the antagonistic striped, among other things assigned by the appearance of NU critical faction against New Order nation. That is that the resistance of political discourse directing of the from of 'counter-hegemony' from on part against hegemony' from the others.*

*Key Words: Nahdlatul Ulama, new order, conflict, and political discourse*

**PENDAHULUAN**

Keberlangsungan kekuasaan rezim Orde Baru selama lebih dari tiga puluh tahun di samping disebabkan legitimasi *material-ekonomi* serta *formal-prosedural*; juga yang tidak kalah pentingnya adalah legitimasi *ideologi*. Melalui legitimasi *ideologi* ini sang rezim memproduksi suatu sistem ideologi yang memungkinkan

pemerintah Orde Baru mempunyai kekuasaan hegemonik (Kutut Suwondo, 1998).

Menurut Yudi Latif dan Idi S. Ibrahim (1996) dalam rangka menguasai berbagai kelompok dan semua lapisan masyarakat, pemerintah Orde Baru bukan saja telah menggelar aparatur represifnya untuk mengendalikan segenap kekuatan oposisi dan pembangkangan, tetapi juga yang tidak kalah hebatnya adalah melalui apa yang disebut dengan upaya-upaya pengendalian dan manipulasi sistem reproduksi ideasional bagi terlaksananya pengoperasian *hegemoni makna*.

Dalam perjalanannya, hegemoni negara atas masyarakat tersebut makin kuat. Seperti keberhasilan negara dalam menanamkan ide-ide pembangunanisme, konsep negara integralisme, sampai pada pemberian tafsir resmi dari negara atas Pancasila yang kemudian dikemas dengan nama P-4 yang didoktrinkan secara masif. Kesemuanya itu telah makin memperkokoh bangunan kekuasaan hegemonik pemerintah Orde Baru sehingga lambat laun kekuasaan hegemonik tersebut semakin tidak menyisakan sedikit pun "*ruang publik*" bagi individu ataupun kelompok masyarakat untuk mengekspresikan diri apalagi mengontrol terhadap negara.

Kondisi yang demikian tersebut pada akhirnya secara akumulatif menciptakan apa yang disebut Ben Anderson (Yudi Latif dan Idi S. Ibrahim, 1996), dengan istilah "*state qua state*" atau "*state for itself*". Yakni suatu kondisi negara telah mencari dasar pembenar bagi dan untuk dirinya sendiri serta menolak aneka kritik dari luar negara. Bahkan negara secara sistematis berusaha menghilangkan semua bentuk kekuatan di luar dirinya yang berpotensi melakukan kritik kepadanya.

Pemerintah Orde Baru dengan segala rekayasanya telah mendesain formasi sosial politik masyarakat yang bebas dari kekuatan oposisi. Pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan dan partai-partai politik selain Golkar dimandulkan, yang berlanjut pada pemandulan dewan legislatif. Hal ini menurut Ben Anderson

(2000) menyebabkan negara telah dijalankan sendiri secara steril oleh sang rezim dengan tanpa kekuatan kontrol dari luar. Lebih-lebih dalam kasus khusus, negara telah secara cermat memanipulasi suatu *thermostat* dimana Golkar sebagai partai pemerintah selalu memenangkan dalam setiap pemilu sejak tahun 1971. Namun demikian, pada saat pemerintah Orde Baru sedang kuat-kuatnya, terutama dengan segenap piranti hegemoniknya dalam merengkuh kekuasaannya, Nahdlatul Ulama (NU) muncul dengan sedikit kekuatan yang tersisa mencoba menghadirkan dirinya sebagai satu kekuatan oposisi dan melakukan perlawanan terhadap negara, baik secara individual oleh para elit faksi kritisnya maupun secara institusional (Laode Ida, 1995; Syamsuddin Haris, 1990).

Faksi kritis adalah salah satu faksi dalam tubuh NU yang selalu mengoreksi melalui kekuatan wacana dan berseberangan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap merugikan kepentingan publik. *Faksi* diartikan sebagai kelompok politik yang memiliki kesamaan kepentingan, pandangan, ide, dan cita-cita yang masing-masing tidak diikat secara formal dalam memperjuangkan cita-citanya sehingga keanggotaannya bersifat tersamar dan tidak tetap (Cheppy Haricahyono, 1991).

Perlawanan faksi kritis NU diwujudkan melalui kontra-wacana terhadap wacana hegemonik pemerintah Orde Baru, lebih-lebih ketika NU era Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Menurut Laode Ida (1995) perjuangan demokratisasi (kontra-hegemoni) Gus Dur terhadap hegemoni negara tercermin pada keterlibatannya dalam *Forum Demokrasi* dan penolakannya terhadap *Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia*. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya perlawanan yang dilakukan oleh faksi kritis NU terhadap pemerintah Orde Baru? Bagaimanakah pola hubungan yang terjadi antara faksi kritis NU dengan penguasa Orde Baru?

### Cara Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dalam studi politik dikenal dengan *strukturalisme*. Melalui pendekatan ini, penggalian aneka data dilakukan baik berupa data *verbal* maupun data *dokumen* melalui *in-depth interview* dan *kajian dokumen*. Wawancara dilakukan terhadap *Gus Dur* sebagai subjek utama penelitian, ditambah dengan lima orang elit NU yaitu KH Musthofa Bisri atau *Gus Mus*, DR. Said Agil Siraj, Masdar Farid Mas'udi, KH Abu Hasan, dan Cholid Mawardi.

Selain sumber data dari wawancara, kajian dokumen yang bersumber dari surat kabar harian *Jawa Pos* juga dilakukan. Kajian terhadap surat kabar ini berupa terbitan dari tanggal 1 Januari 1988 sampai 31 Desember 1997. Untuk melengkapi ketercukupan data peneliti juga mengkaji dokumen yang bersumber dari Majalah Editor dan tiga majalah utama NU yaitu: *Aula* (terbitan PWNU Jawa Timur), *Pesantren* (terbitan P3M Jakarta), dan *Bangkit* (terbitan LKPSM NU Daerah Istimewa Yogyakarta).

Untuk pengujian aseptabilitas dan kredibilitas data yang sudah terkumpul digunakan triangulasi melalui *variasi metode* dan *sumber data*, serta *diskusi ahli*. Sehingga terhadap semua data hasil wawancara yang terkumpul kemudian dianalisis secara *kualitatif*, sedang data-data yang bersumber dari dokumen dipakai *analisis content*.

### PEMBAHASAN

Hasil analisis atas keseluruhan data pada akhirnya diperoleh gambaran antara lain mengenai: potret NU beserta faksi-faksi yang ada di dalamnya, bentuk-bentuk perlawanan faksi kritis NU terhadap negara kekuasaan pemerintah Orde Baru, dan pola perlawanan yang digunakan faksi kritis NU terhadap kekuasaan pemerintah Orde Baru. Paparan hasil dan pembahasan tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

### NU dan Faksi-Faksi di dalamnya

NU merupakan salah satu dari beberapa organisasi Islam yang ada di Indonesia, antara lain seperti Muhammadiyah, Al-irsyad, Hizbut Tahrir, Persis dan Syarikat Islam. Dari segi kuantitas, NU oleh para ahli dianggap paling besar karena memiliki anggota lebih dari 65 juta orang. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang didirikan oleh 15 kyai tradisional dan beberapa pengusaha di Surabaya Jawa Timur (Martin Van Bruinessen, 1997). Di antara kyai pendiri yang terkenal saat itu adalah KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdul Wahab Hasbullah (Choirul Anam, 1994).

Sebelum sebagai organisasi Islam terbesar, NU merupakan suatu paguyuban (*jama'ah*) dengan bentuk pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar di kawasan pedesaan. Hal ini karena jauh sebelum terbentuk sebuah organisasi (*jam'iyah*), NU telah ada sebagai *jama'ah* yang diikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakter *Ahlussunnah wal jama'ah* (Gaffar Karim, 1995).

Sebagai penganut paham keagamaan *Ahlussunnah wal jama'ah*, komunitas NU selalu mendasarkan segenap pemikiran dan perilakunya pada sumber *Al-Qur'an*, *As-sunnah* (Hadits), *Al-ijma'* (konsensus ulama), dan *Al-qiyas* (analogi). Dalam khasanah pesantren, *Ahlussunnah* berarti kelompok orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad dan *Jama'ah* berarti orang-orang alim sesudah wafatnya Nabi terutama Khulafa' Arrosyidin beserta pengikutnya. Sehingga *Ahlussunnah Wal Jama'ah* berarti kelompok orang yang mengikuti jejak nabi Muhammad dan Khulafa' Arrosyidin beserta pengikut sesudahnya.

Secara lebih spesifik, dikatakan bahwa orang yang termasuk golongan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* adalah orang-orang yang memiliki tiga kriteria: *pertama* mereka yang mau mengakui dan mengikuti empat madhab di bidang fiqih (hukum) yaitu: Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i; *kedua* yang mau mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansyur Al-Maturidli di bidang tauhid

(teologi), dan ketiga mengikuti Abu Qosim Al-Junaidi di bidang tasawuf (Kacung Marijan, 1992). Dari para tokoh pemikir tersebut, muncullah norma-norma perilaku golongan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, yaitu (1) *Tawasuth* dan *ijtihad* artinya mengambil sikap moderat atau jalan tengah dan lurus di tengah-tengah masyarakat. (2) *Tasamuh* artinya bersikap toleran terhadap segala perbedaan. (3) *Tawazun* artinya berbuat adil dan selalu menjaga relasi keseimbangan, yakni relasi dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, termasuk dalam kaitan waktu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Serta (4) *Amar Ma'ruf nahi munkar* yang intinya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kejelekan (Kacung Marijan, 1992).

Melalui periode waktu perjalanannya, organisasi penganut *Ahlussunnah Wal Jama'ah* ini menemui banyak rintangan dan hambatan tidak hanya pada masa pra kemerdekaan, akan tetapi juga pada saat Orde Lama dan Orde Baru, termasuk juga hambatan yang sifatnya internal maupun eksternal. Namun semua itu bisa dilaluinya, sehingga ia bisa tumbuh berkembang dan memperoleh kemajuannya (M. Mashur Amin, 1996). Sekarang, NU telah menjadi organisasi besar yang telah menyebar luas ke seluruh penjuru tanah air.

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU menghadapi banyak kendala, di antaranya persoalan menyatukan segenap potensi sumberdaya manusianya. Banyak variasi pemikiran, ide, gagasan, bahkan tarik menarik kepentingan di antara para elitnya, menyebabkan terjadinya pengelompokan di antara mereka yang dalam ilmu politik diistilahkan dengan terminologi "*faksi*".

Ada banyak faksi di dalam tubuh NU. Setiap faksi umumnya terdapat beberapa elit kyai beserta massa pengikutnya. Paling tidak, beberapa faksi dalam NU pada dekade 1990-an menurut pengamatan Andree Feillard (1999) terbagi ke dua kelompok besar, yaitu: (a) *Faksi Konservatif*, dan (b) *Faksi Progresif*. Sedangkan A. Gaffar Karim (1995) membedakannya ke dalam dua kelompok

faksi yaitu: *faksi politisi* dan *faksi non-politisi* atau dikenal juga dengan istilah *faksi Cipete* dan *faksi Situbondo*.

*Faksi konservatif* atau *faksi politisi* yang dimotori oleh KH Idham Khalid, KH Yusuf Hasyim, dan Kyai Ilyas Rukhiyat. *Faksi progressif* atau *non-politisi* yang ditokohi oleh Kyai Achmad Siddiq, Kyai Sahal Machfud, dan Gus Dur dari kalangan tua, serta Masdar F. Mas'udi, Said Agil Siraj, Ulil Abshar Abdalla, dan M. Imam Azis dari kalangan muda.

### Perlawanan Faksi Kritis NU terhadap Pemerintah Orde Baru

Perlawanan faksi kritis NU terhadap kekuasaan pemerintah Orde Baru dilakukan melalui wacana politik. Wacana politik yang dikembangkan faksi kritis NU ini dilakukan sebagai wacana tanding (*counter-discourse*) terhadap wacana hegemonik (*hegemonic discourse*) pemerintah Orde Baru. Wacana tanding tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: *Pertama*, terdapat sepuluh tema wacana politik meliputi: rusaknya penyelenggaraan pemilu, kecurangan politisi dan partai politik, penyimpangan badan legislatif, manipulasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pengebirian pers, pelecehan hukum, pembelaan HAM dan kaum minoritas, perilaku bejat pejabat, pembelaan keutuhan integritas bangsa, dan kedudukan agama dalam negara demokrasi.

Empat tema sebagaimana disebut yang awal yang merupakan tema yang berkaitan dengan perangkat formal demokrasi. Tiga tema berikutnya yang merupakan faktor penting yang dapat menopang dan mendorong demokratisasi sedangkan sisanya berupa tema-tema yang berkaitan dengan efek lanjut dari kelompok pertama dan kedua.

Dalam hal pengembangan wacana tanding tentang perilaku pejabat dan politisi, faksi kritis yang dimotori Gus Dur menyampaikan kritik sebagai berikut:

"Saat ini, masih banyak keputusan pemerintah yang secara nyata belum mampu memberi keuntungan kepada rakyat kecil. Saya tidak mengkritik

Iho. Namun itulah yang masih terasa sampai saat ini. ....Sistem politik seperti itu salah satunya disebabkan belum adanya kejelasan strategi dalam berpolitik. Karenanya, begitu benar-benar terjun dalam kehidupan politik di pemerintahan, politisi banyak yang bingung. Setelah menjadi anggota dewan atau masuk di pemerintahan bingung mau berbuat apa" (14 September 1993).

Selama Orde Baru berkuasa, hukum seolah telah menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Tidak adanya keadilan bagi rakyat pencari hukum, sebaliknya para pejabat dengan leluasa memperoleh perlindungan hukum. Mengenai rusaknya hukum dan upaya penegakan hukum di Indonesia tersebut kritik yang dikembangkan oleh faksi kritis NU adalah:

"...sekarang ini hukum belum bisa dilaksanakan secara adil dan menyeluruh. Contohnya belum sebandingnya hukuman yang diberikan kepada pemerkosa wanita dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pencuri ayam. ....Hukum harus lebih tegas terhadap pelaku yang bersalah besar. Jangan sampai ada kesan bahwa orang kuat kini bisa dengan mudah menghindari hukum" (5 Juli 1995).

Menyangkut kebebasan pers yang pada saat itu seolah masih merupakan barang langka, faksi kritis NU mengembangkan wacana sebagai berikut:

"....Mbok ya ada kebebasan berbicara tanpa ada ketakutan SIUPP-nya dicabut. Selesaikan lewat pengadilan. Saya tidak pernah setuju dengan pencabutan SIUPP apa pun. Bawalah ke pengadilan, itulah penyelesaian yang terbaik. Bung Karno zaman kolonial dia dihukum oleh pemerintah kolonial, tapi dia membuat pledoi dalam *Indonesia Menggugat*, dan itu yang menjadi pegangan hidup bangsa kita saat ini" (Editor, 1990).

*Kedua*, perlawanan dengan menggunakan instrumen wacana sebagaimana dipakai Gus Dur bersama anggota faksi kritis NU lainnya terutama dalam melakukan gerakan oposisi terhadap penguasa Orde Baru, merupakan pola perlawanan dengan bentuknya yang paling baru. Hal ini dapat dibandingkan dengan

bentuk-bentuk perlawanan yang banyak dilakukan para tokoh oposisi sebelumnya yang umumnya lebih menonjolkan pada bentuk '*political pressure*' melalui institusi politik yang ada maupun melalui kekuatan massa. Sedang kali ini upaya perlawanan dan penentangan yang dilakukan faksi kritis NU memiliki nuansa lain.

*Ketiga*, bentuk perlawanan dengan menggunakan instrumen wacana politik (*political discourse*) mencerminkan adanya dua hal penting. *Satu sisi* Gus Dur bersama faksi kritis lainnya berusaha menerapkan teknik baru sebagai bagian dari strategi menghadapi penguasa otoriter pada saat itu, sehingga sasaran yang ingin dicapai bisa terwujud. Sebagaimana diungkapkan Gus Dur, bahwa "*yang penting adalah hasil yang kita inginkan*" (Jawa Pos, 30 Januari 1990). Yakni terwujudnya perubahan kultur dan tatanan politik yang demokratis. Sedang *sisi lainnya* adalah dengan menggunakan teknik ini mereka tidak ingin membawa massa pendukungnya untuk terlibat secara langsung berhadapan dengan penguasa Orde Baru, sehingga secara relatif massa *nahdliyyin* tidak akan kena 'getah' (atau *limbah politik*--pinjam istilahnya Hasyim Muzadi) dalam perseteruan tersebut.

*Keempat*, oleh karena perlawanan yang mereka pakai lebih bertumpu pada penggunaan instrumen wacana politik (*political discourse*) yang berbeda dengan bentuk perlawanan sebelumnya, maka secara empirik juga telah menyulitkan penguasa Orde Baru untuk mengatasinya. Hal ini terlihat bahwa dalam periode waktu tersebut (1988-1997) sang penguasa betul-betul kebingungan atau paling tidak terdapat kegamangan untuk mengambil '*tindakan tegas*'. Berbeda dengan sebelumnya, dimana bentuk hukuman paling lazim yang diterima para penentang Orde Baru antara lain adalah dengan cara dimusnahkan atau dibunuh, dipenjara, diisolir, disingkirkan, dipangkas akar kekuasaannya serta bentuk-bentuk hukuman repressif lainnya yang dilakukan dengan tangan besi sebagaimana telah lama dipraktikkannya (Irwani Abdullah, 1999, Edward Aspinal, 2000).

*Kelima*, upaya perlawanan dengan bentuk konvensional sebagaimana dilakukan para tokoh politik sebelumnya umumnya telah gagal dan menerima aneka tindakan tegas dari penguasa Orde Baru. Namun, gerakan oposisi yang dilakukan oleh Gus Dur bersama faksi kritis NU justru secara relatif menunjukkan hasil meskipun tidak secara optimal. Di antaranya adalah telah menghasilkan debat wacana pada level publik yang pada gilirannya mampu mendorong ke arah terciptanya kesadaran masyarakat *di satu sisi*, serta tercapainya sasaran kritik menyentuh titik bidik pusat kekuasaan *pada sisi lain*.

Dari keseluruhan paparan tentang perlawanan wacana tersebut tampak bahwa faksi kritis berusaha mengantarkan pada terwujudnya suatu keadaan dimana pemerintah Orde Baru kehilangan konsensusnya. Sebagaimana disebutkan Antonio Gramsci (1976), penguasa seperti ini tidak lagi 'memimpin' (*leading*) namun hanya 'dominasi' (*dominance*) serta menjalankan kekuatan kekerasan sendiri sehingga pada gilirannya kondisi semacam ini secara akumulatif akan membawa kepada suatu keadaan yang oleh Gramsci disebut dengan *krisis hegemoni* atau oleh Habermas (1975) diistilahkan dengan *krisis legitimasi*.

Beberapa wacana tandingan (*counter discourse*) yang diproduksi oleh faksi kritis seperti yang telah diuraikan di atas, telah membuat posisi kelas dominan (pemerintah Orde Baru) menjadi serba sulit. Kedudukan mereka di mata masyarakat secara tidak langsung mulai menurun, popularitasnya juga menjadi semakin luntur. Lebih-lebih wacana yang diproduksi Gus Dur dan Gus Mus yang isinya menjelaskan perilaku pejabat sebagai sesuatu yang rakus, menindas, despotik, dan diskriminatif, merupakan suatu produksi wacana yang berisi hujatan terang-terangan.

Sebagai penguasa yang legitimasi kekuasaannya antara lain mengandalkan kekuatan wacana hegemoniknya, sebenarnya rezim Orde Baru dituntut harus bisa mengimbangi terhadap kontra-wacana yang dikembangkan faksi kritis dengan cara mereproduksi wacana atau makna atas simbol yang baru ketika mendapat

perlawanan wacana atau wacana tandingan dari kelompok masyarakat. Namun, yang terjadi justru sang penguasa nampak tidak berdaya menghadapi perlawanan dari faksi kritis, lebih-lebih bila perlawanan tersebut berupa kritikan dan hujatan. Mengapa demikian?

Ada tiga penjelasan rasional yang bisa menjawab atas pertanyaan tersebut, yaitu: *Pertama*, pelaku utama penguasa Orde Baru adalah purnawirawan petinggi militer Angkatan Darat sehingga karakter sebagai militer masih sangat melekat dan mempengaruhi kepribadian dan segala bentuk tindakan yang diambilnya. Dalam dunia militer, pendekatan utama dalam menghadapi lawan adalah pemusnahan. Oleh karena itu, ketika mereka menghadapi lawan-lawan politik yang 'menyerangnya' dengan menggunakan instrumen wacana, mereka menjadi kehilangan kecerdasannya untuk merekonstruksi kembali wacana yang telah mereka produksi sebelumnya.

*Kedua*, karena usia para pelaku Orde Baru yang sudah semakin uzur, terutama pada diri Soeharto yang pada saat itu usianya sudah memasuki tahun ketujuh puluh. Dengan semakin lanjut usianya para pelaku utama Orde Baru jelas sangat mempengaruhi kecerdasan dan kecerdikan mereka sehingga menjadi menurun. Hal ini sangat berbeda bila dilihat di awal kemunculannya dalam memimpin dan berkuasa di negeri ini. Sebagaimana disebutkan Gus Dur bahwa Soeharto adalah seorang yang bodoh.

*Ketiga*, terdapat keunggulan pada pihak faksi kritis terutama tampak menonjol adalah Gus Dur dan Gus Mus dimana keduanya ini *di satu sisi* sangat aktif memproduksi wacana serta di sisi yang lain mereka sangat dekat dengan pers sehingga memungkinkan pernyataan-pernyataannya selalu terpublikasikan.

### Corak Hubungan Faksi Kritis NU dengan Pemerintah Orde Baru

Dari data yang ditemukan diperoleh gambaran bahwa corak hubungan faksi kritis NU dan Pemerintah Orde Baru pada periode tahun 1988 sampai 1997 dapat dikategorikan sebagai hubungan yang *'saling berseberangan'* atau *'antagonistik'*. Masing-masing memproduksi wacana yang saling menegasikan satu sama lain sehingga terjadi apa yang disebut dengan konflik wacana (*discourse conflict*).

Konflik wacana yang menandai corak hubungan yang bersifat *antagonistik* tersebut muncul ketika negara mengembangkan wacana hegemonik tertentu selalu saja mendapatkan *'countre-discourse'* dari faksi kritis NU. Sebaliknya, ketika tokoh kritis NU memproduksi wacananya sendiri, hampir selalu mendapat respon negatif atau kritikan balik dari pejabat Orde Baru.

Salah satu contoh pertentangan wacana ini misalnya tentang perpecahan di tubuh PDI antara kelompok Soerjadi dengan kelompok Megawati. Negara melalui ketua DPA Soedomo, meminta Megawati mundur dari percaturan politik untuk menentramkan suasana menjelang pemilu yang sudah semakin panas (*Jawa Pos*, 22 April 1997).

Pernyataan Soedomo tersebut dibantah keras FK terutama oleh Gus Dur. Menurut Gus Dur, sangat aneh bila menyelesaikan kemelut PDI hanya dengan menyuruh mundur Megawati sementara Soerjadi masih tetap *'bertengger'* sebagai ketua umum DPP PDI hasil kongres IV Medan. Hal itu berarti pemerintah tidak adil dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Penyelesaian yang paling baik menurutnya adalah bagaimana mendudukkan akar persoalan sehingga kepentingan Soerjadi dan Mega itu bisa dipertemukan. Dalam pertemuan itu dua-duanya harus diminta untuk mencari titik temu itu. Bukan dibiarkan sendiri-sendiri seperti sekarang (*Jawa Pos*, 22 April 1997).

Bahkan sebelumnya FK juga telah mengkritik pejabat negara mengenai sikap mereka yang sengaja mempermainkan perihal

kasus PDI. Antara satu pejabat dengan pejabat lainnya, membuat pernyataan yang berlainan. Hal ini menurut FK jelas sangat membingungkan masyarakat (*Jawa Pos*, 7 Juli 1996). Yang lebih berbahaya, menurut FK adalah upaya penyelesaian masalah-masalah yang ada --termasuk kemelut PDI-- oleh pemerintah dilakukan dengan cara-cara kekerasan (*Jawa Pos*, 8 Juli 1996). Hal ini menurutnya merupakan gejala yang membahayakan.

Contoh lain yang menampakkan konflik wacana antara negara dengan faksi kritis NU adalah mengenai keberadaan *Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)*. KIPP yang keberadaannya berasal dari usulan Jend (pur) A.H. Nasution (*Jawa Pos*, 5 Maret 1996) tersebut banyak ditentang oleh pejabat Orde Baru, misalnya KASAD Jend R. Hartono. Menurutnya, keberadaan KIPP tidak diperlukan (*Jawa Pos*, 5 Maret 1996). Namun, pendapat R. Hartono tersebut ditentang oleh FK. Dalam pandangan FK, kehadiran KIPP sebenarnya untuk mendidik bangsa Indonesia agar bisa melaksanakan pemilu dengan bebas, jujur, dan adil. Jadi, KIPP lebih berfungsi edukatif (*Jawa Pos*, 9 April 1996).

Dari dua kasus di atas, yakni kasus yang menyangkut kemelut PDI dan keberadaan KIPP, sudah menunjukkan bahwa konflik wacana antara negara dengan elit NU mengemuka. Bahkan dalam hal lain konflik wacana antar keduanya ini berlangsung semakin kuat. Oleh karena itu, dengan melihat indikasi adanya konflik wacana yang berlangsung terus menerus mulai tahun 1988 sampai dengan tahun 1997, maka corak hubungan faksi kritis NU dengan pemerintah Orde Baru pada periode waktu tersebut merupakan corak hubungan perlawanan (*conflict*). Wujud konflik yang ada adalah perlawanan wacana politik antar keduanya.

### SIMPULAN

Dari uraian yang disajikan di atas akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian. Di antaranya adalah bahwa selama kurun waktu satu dekade menjelang kejatuhan presiden Soeharto beserta rezim Orde Barunya, telah terjadi hubungan konflik antara

faksi kritis NU dengan pemerintah Orde Baru. Potret konflik politik antar keduanya tersebut terjadi terutama lebih mengemuka pada tataran wacana politik (*political discourse*).

Secara historis, perlawanan faksi kritis NU terhadap pemerintah Orde Baru tersebut amat berbeda dengan aneka perlawanan dari beberapa tokoh oposisi Indonesia sebelumnya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh tokoh-tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Petisi-50, tokoh demonstrasi mahasiswa, masyarakat Tanjungpriuk, serta oleh tokoh NU sendiri ketika NU masih menjadi partai politik.

Bila sebelumnya, perlawanan terhadap rezim lebih menggunakan pola dan bentuk konvensional yakni lebih menonjolkan bentuk *'political pressure'* melalui institusi-institusi formal politik maupun melalui kekuatan massa. Namun upaya perlawanan yang dilakukan faksi kritis NU lebih berupa penggunaan instrumen wacana politik (*political discourse*).

Perlawanan sebelumnya selalu mengalami kegagalan, sedang kali ini perlawanan yang dilakukan faksi kritis NU telah berhasil mendorong terciptanya debat wacana pada level publik yang pada gilirannya mampu membawa ke arah terciptanya kesadaran warga negara pada *satu sisi*; serta tercapainya sasaran kritik menyentuh titik bidik pada pusat kekuasaan pada *sisi yang lain*.

Perlawanan wacana yang dikembangkan oleh faksi kritis NU merupakan upaya pelan-pelan namun sistematis untuk menolak atas konsensus berkaitan dengan produksi wacana dari negara. Gus Dur dan kawan-kawannya dalam faksi kritis NU mengajak kepada segenap masyarakat untuk menolak bahwa struktur kesadarannya dibimbing oleh pemerintah Orde Baru melalui *wacana hegemonik*.

Pemerintah Orde Baru melalui wacana hegemonik berusaha mengembangkan kontrol atas kesadaran. Dengan mengembangkan kontrol atas kesadaran berarti negara menguasai secara langsung maupun tidak langsung *struktur-struktur kognitif* dari masyarakat. Atau dengan kata lain, negara berusaha membangun *'makna atas simbol'* dengan cara memproduksi *'meaning'*. Makna atau *meaning*

tersebut kemudian ingin ditanamkan kepada setiap warga negara untuk menjadi bagian dari kesadarannya sehingga pada gilirannya negara dapat menanamkan *"conscious manipulation"*. Namun, kesemua itu telah diketahui oleh faksi kritis, yang dalam pandangannya pemerintah Orde Baru dianggap berusaha ingin tetap berkuasa dan tetap mengendalikan masyarakat. Oleh karenanya, faksi kritis NU mencoba mengelak dari perangkap yang diproduksi negara yang sekaligus juga membuat wacana tanding (*counter discourse*). Dengan kata lain, Gus Dur bersama anggota faksi kritis lain mengelak membuat suatu *konsensus* atau *'substratum of agreements'* sebagaimana diinginkan negara.

Dari upaya-upaya perlawanan melalui penciptaan wacana tanding dari faksi kritis di atas, secara berangsur-angsur dapat mengantarkan pada terwujudnya suatu keadaan dimana pemerintah Orde Baru mulai kehilangan konsensusnya, sehingga negara tidak lagi *'memimpin'* (*leading*) namun hanya *'dominasi'* (*dominance*); yang pada gilirannya secara akumulatif dapat membawa kepada suatu keadaan yang oleh Gramsci disebut dengan *krisis hegemoni* (Antonio Gramsci, 1976). atau oleh Habermas diistilahkan dengan *krisis legitimasi* (Jurgen Habermas, 1975). Dengan kata lain, faksi kritis NU telah melakukan upaya yang disebut *delegitimasi* kekuasaan pemerintah Orde Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gaffar Karim. (1995). *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*.
- Anderson, Benedict R. O'G. (2000). *Kuasa-Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Arief Afandi (ed). (1997). *Islam Demokrasi Atas-Bawah, Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Arief, Nezar Patria; dan Andi. (1999). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feillard, Andree. (1995). *Islam et Armee Dans L'Indonesie s Contemporaine Les Pionners de la Tradition*. Paris: L'Harmattan-Association Archipel. (Terj. 1999. NU vi-a-vis Negara. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial-LKIS).
- Habermas, Jurgen. (1997). *Theorems of Crisis Legitimation*. Hand-out Kuliah S-2 Teori-Teori Sosial Makro-Mikro, Pascasarjana Unair Surabaya. (Sumber dari internet file: <http://www.internet.netcape/legistcp>).
- Kacung Marijan. (1992). *NU's Response to The New Order's Political Development*. The Indonesian Quarterly, Vol-XX nomor 1 First Quarter 1992. Jakarta: CSIS.
- Kutut Suwondo. (1998). *Negara dan Civil Society: Kajian Teoritis dan Empiris Perkembangan Politik Indonesia* Jurnal Ilmiah "Kritis" Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Laode Ida. (1995). *Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Era Abdurrahman Wahid: Perjuangan Demokratisasi di Tengah Arus Negara Kuat*. Analisis CSIS Th.XXIV Nomor 3 Mei-Juni 1995. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Kembali Ke Khittah 1926: Membangun Gerakan Politik Kultural NU*. Prisma Nomor 5-1995. Jakarta: LP3ES.
- Mansour Fakhri. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Masyhur Amin. (1996). *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: Al Amin Press.
- Muhadi Sugiono. (1999). *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Syamsudin Haris. (1990). *Nahdlatul Ulama and Politics: A Search for Identity*. The Indonesian Quarterly Vol-XVII Nomor 3 Third Quarter 1990. Jakarta: CSIS.
- Van Bruinessen, Martin. (1994). *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. (1996). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.